Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (2) 2026, Page: 27252-27255

Kapasitas Birokrasi dalam Implementasi Kebijakan Publik: Studi Evaluasi Kurikulum Merdeka pada Jenjang Sekolah Dasar

Laura Vanessa Purba, Ziana Zain Ramadhani, Indah Prabawati, Firre An Suprapto
[1,2,3,4]Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Surabaya
Corresponding Author: Laura Vanesa Purba, E-Mail: 25040674327@mhs.unesa.ac.id

Published: Mei, 2026

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kapasitas birokrasi dalam implementasi kebijakan publik melalui evaluasi pelaksanaan Kurikulum Merdeka pada jenjang Sekolah Dasar (SD). Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi pustaka yang mengacu pada regulasi nasional, data sekunder dari Rapor Pendidikan, serta literatur ilmiah terakreditasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas birokrasi pada aspek komunikasi dan struktur organisasi telah berjalan cukup efektif, yang terlihat dari adanya koordinasi kebijakan yang lebih terarah serta peningkatan capaian pembelajaran di beberapa daerah. Namun, pada aspek sumber daya masih ditemukan hambatan serius berupa rendahnya kompetensi digital tenaga pendidik, keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, serta belum optimalnya distribusi dukungan antar sekolah. Selain itu, kapasitas birokrasi dalam aspek disposisi atau komitmen pelaksana kebijakan juga menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan implementasi. Kesimpulannya, keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals 4 sangat bergantung pada penguatan kapasitas birokrasi, terutama dalam peningkatan kompetensi digital, penyediaan sarana prasarana, serta pengawasan yang berkelanjutan.

Kata kunci: Kapasitas Birokrasi, Implementasi Kebijakan Publik, Kurikulum Merdeka, SDG 4, Sekolah Dasar, Literasi Digital.

ABSTRACT

This study aims to analyze bureaucratic capacity in public policy implementation through an evaluation of the implementation of the Merdeka Curriculum at the Elementary School level. This research uses a qualitative descriptive method with a literature study approach referring to national regulations, secondary data from the Education Report, and accredited scientific literature. The findings show that bureaucratic capacity in the aspects of communication and organizational structure has functioned quite effectively, as reflected in more directed policy coordination and improved learning outcomes in several regions. However, in terms of resources, there are still serious obstacles such as the low digital competence of educators, limited information technology infrastructure, and the uneven distribution of support among schools. In addition, bureaucratic capacity in the aspect of disposition or the commitment of policy implementers is also an important factor in determining the success of implementation. In conclusion, the successful implementation of the Merdeka Curriculum in supporting the achievement of Sustainable Development Goals 4 highly depends on strengthening bureaucratic capacity, particularly in improving digital competence, providing adequate infrastructure, and ensuring sustainable supervision.

Keywords*: Bureaucratic Capacity, Public Policy Implementation, Merdeka Curriculum, Digital Literacy, Elementary School.*

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Implementasi kebijakan publik dalam bidang pendidikan memerlukan kapasitas birokrasi yang kuat agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara efektif dan merata. Dalam konteks pendidikan di Indonesia, Kurikulum Merdeka hadir sebagai kebijakan strategis untuk menjawab tantangan pembelajaran abad ke-21 yang menekankan kreativitas, kolaborasi, pemecahan masalah, dan Literasi Digital. Kebijakan ini diperkuat melalui Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024 yang memberikan fleksibilitas pembelajaran dengan berfokus pada materi esensial dan penguatan karakter peserta didik (Kemendikbudristek, 2024).

Pada jenjang Sekolah Dasar, implementasi Kurikulum Merdeka menjadi penting karena merupakan fondasi utama pembentukan kemampuan literasi dan numerasi siswa. Hal ini terlihat dari capaian Rapor Pendidikan 2024 di Kabupaten Banyuwangi yang menunjukkan peningkatan skor literasi sebesar 84,54 dan numerasi sebesar 78,87 (Diskominfo Jawa Timur, 2024). Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa

penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan asesmen formatif berkontribusi terhadap peningkatan kompetensi siswa (Cholifah dkk, 2023).

Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi tantangan, seperti rendahnya kompetensi digital guru, keterbatasan infrastruktur teknologi, dan belum meratanya dukungan institusional. Menurut teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, keberhasilan kebijakan dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kapasitas birokrasi dalam implementasi Kurikulum Merdeka pada jenjang Sekolah Dasar guna mendukung tercapainya kualitas pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research) untuk menganalisis kapasitas birokrasi dalam implementasi Kurikulum Merdeka pada jenjang Sekolah Dasar di Indonesia (Moleong, 2017). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pengkajian teori, kebijakan, dan data sekunder yang relevan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan publik dalam bidang pendidikan.\

Sumber data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer berupa dokumen resmi pemerintah seperti Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024 (Kemendikbudristek, 2024). Sementara itu, data sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah terakreditasi, artikel ilmiah, buku, laporan Rapor Pendidikan 2024, serta data dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur terkait peningkatan skor literasi dan numerasi siswa di Kabupaten Banyuwangi (Diskominfo Jawa Timur, 2024). Pemilihan sumber dilakukan secara purposive berdasarkan relevansi topik, tahun publikasi, dan kredibilitas sumber.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan studi literatur dengan mengidentifikasi, mengumpulkan, serta mengkaji berbagai dokumen dan referensi yang berkaitan dengan implementasi Kurikulum Merdeka. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis), yaitu dengan proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara sistematis (Sugiyono, 2019).

Analisis penelitian menggunakan teori implementasi kebijakan dari George C. Edwards III yang menitikberatkan pada empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi (Edwards III, 1980). Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dengan membandingkan data dari regulasi, jurnal ilmiah, dan laporan resmi agar hasil penelitian lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

HASIL

Berdasarkan hasil studi dokumentasi terhadap laporan capaian pendidikan dan regulasi nasional, ditemukan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka di jenjang Sekolah Dasar menunjukkan tren performa birokrasi yang positif namun belum merata. Kapasitas birokrasi dalam menyerap kebijakan baru terlihat dari peningkatan kompetensi dasar siswa secara nasional.

Data spesifik dari Rapor Pendidikan Kabupaten Banyuwangi tahun 2024 menunjukkan bahwa kapasitas implementasi di daerah tersebut berada pada kategori tinggi, dengan capaian skor literasi sebesar 84,54 dan skor numerasi sebesar 78,87 (Diskominfo Jawa Timur, 2024). Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan unit birokrasi sekolah dalam mengadopsi model pembelajaran berdiferensiasi dan asesmen formatif yang menjadi inti dari kebijakan Kurikulum Merdeka (Cholifah dkk., 2023).

Namun, secara sistemik, ditemukan adanya kesenjangan kapasitas antar satuan pendidikan. Meskipun secara regulasi (Permendikbudristek No. 12 Tahun 2024) fleksibilitas telah diberikan, namun distribusi dukungan institusional dan infrastruktur teknologi informasi masih terkonsentrasi pada sekolah-sekolah di wilayah perkotaan, yang berdampak pada variasi kecepatan implementasi kebijakan di lapangan.

PEMBAHASAN

Analisis terhadap kapasitas birokrasi dalam implementasi Kurikulum Merdeka dilakukan dengan menggunakan empat variabel determinan dari teori George C. Edwards III:

1. **Komunikasi (Communication)**

Kapasitas birokrasi dalam aspek komunikasi dinilai cukup efektif melalui proses transmisi informasi yang terstruktur. Penyaluran kebijakan dari pemerintah pusat hingga ke satuan pendidikan dasar dilakukan melalui platform digital yang terintegrasi. Hal ini meminimalkan distorsi informasi yang sering terjadi pada model birokrasi manual. Kejelasan standar operasional dalam Kurikulum Merdeka memungkinkan aktor di tingkat sekolah memahami peran dan tanggung jawabnya secara lebih terarah (Anggraeni & Ganda, 2022).

2. **Sumber Daya (Resources)**

Variabel sumber daya merupakan aspek paling kritis yang membatasi kapasitas birokrasi sekolah. Temuan menunjukkan adanya defisit kapasitas pada sumber daya manusia, khususnya dalam hal literasi digital guru. Implementasi kebijakan yang berbasis teknologi menuntut kecakapan TIK yang tinggi, namun banyak tenaga pendidik di tingkat SD yang belum mencapai standar kompetensi tersebut (Septiana & Hanafi, 2022). Selain itu, keterbatasan infrastruktur teknologi menjadi hambatan fisik yang menghalangi kapasitas sekolah dalam menjalankan fungsi pelayanan pendidikan yang inovatif (Lenni, dkk., 2025).

3. **Disposisi (Disposition)**

Disposisi atau komitmen para pelaksana kebijakan (kepala sekolah dan guru) menunjukkan kecenderungan yang positif. Kapasitas birokrasi diperkuat oleh kemauan aktor di lapangan untuk menerima perubahan (Sari & Rahmawati, 2023). Adanya insentif berupa kemudahan dalam mengelola kreativitas pembelajaran mendorong disposisi yang kuat, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap pencapaian target mutu pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam SDG 4.

4. **Struktur Birokrasi (Bureaucratic Structure)**

Transformasi Kurikulum Merdeka diikuti dengan penyederhanaan struktur pelaporan melalui digitalisasi. Mekanisme pengawasan yang dulunya bersifat hierarkis dan administratif kini bergeser menjadi lebih fungsional melalui pemanfaatan data Rapor Pendidikan (Susilawati, 2021). Hal ini meningkatkan kapasitas birokrasi dalam melakukan evaluasi diri dan perencanaan berbasis data, sehingga program-program penguatan literasi dan numerasi menjadi lebih tepat sasaran

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang mendalam menggunakan model George C. Edwards III, penelitian ini menyimpulkan bahwa kapasitas birokrasi dalam menerapkan kebijakan Kurikulum Merdeka di jenjang Sekolah Dasar telah menunjukkan hasil yang cukup efektif, terutama pada aspek komunikasi dan struktur organisasi. Transmisi informasi yang sukses melalui platform digital terintegrasi dapat mengurangi distorsi dalam kebijakan, sedangkan penyederhanaan struktur pelaporan berbasis data telah mengubah fungsi pengawasan birokrasi menjadi lebih fungsional. Hal tersebut dibuktikan melalui pencapaian Rapor Pendidikan Kabupaten Banyuwangi tahun 2024 yang menunjukkan peningkatan signifikan pada skor literasi sebesar 84,54 dan numerasi sebesar 78,87, yang menjadi indikator keberhasilan kinerja pelayanan publik di tingkat dasar.

Namun, secara sistemik masih terdapat ketidakcukupan kapasitas pada variabel sumber daya yang menjadi penghambat utama dalam percepatan pelaksanaan kebijakan. Kurangnya kompetensi digital para pendidik serta ketimpangan infrastruktur teknologi informasi antarwilayah menghalangi pemanfaatan optimal fleksibilitas kurikulum yang diamanatkan dalam Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024. Oleh karena itu, penguatan kapasitas birokrasi di masa depan harus diprioritaskan melalui program pengembangan kompetensi digital guru yang berkelanjutan serta pemerataan akses teknologi informasi secara nasional. Upaya kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta infrastruktur pendidikan merupakan faktor kunci untuk menjamin keberlanjutan transformasi pendidikan nasional demi mencapai target kualitas pendidikan yang inklusif pada Sustainable Development Goals (SDG) 4.

DAFTAR PUSTAKA

Anggraeni, S., & Ganda, N. (2022). Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar: Tantangan dan Solusi. *Jurnal Edukasi,* 10(1), 45-58.

Cholifah, T. R., dkk. (2023). Dampak Kurikulum Merdeka terhadap Kompetensi Literasi dan Numerasi Siswa Sekolah Dasar. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pengajaran,* 7(2), 201-215.

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. (2024). *Skor Literasi dan Numerasi Siswa SD & SMP di Banyuwangi Meningkat.* Portal Informasi Publik Kominfo Jatim.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2024). *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.* Jakarta: Kemendikbudristek.

Lenni, R., Alimun, F. H., Setiawati, F. H. M., & Hayati, N. (2025). Tantangan Dan Peluang Kurikulum Merdeka di Era Digitalisasi. *Journal Educational Research and Development (JERD),* 1(4), 386-390.

Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: Remaja Rosdakarya.

Sari, P. K., & Rahmawati, I. (2023). Implementasi Kebijakan Kurikulum Merdeka dalam Meningkatkan Kreativitas Siswa. *Jurnal Administrasi Pendidikan,* 15(3), 310-322.

Septiana, A. R., & Hanafi, M. (2022). Pemantapan Kesiapan Guru dan Pelatihan Literasi Digital pada Implementasi Kurikulum Merdeka. *JOONG-KI: Jurnal Pengabdian Masyarakat,* 1(3), 380-384.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Susilawati, N. (2021). Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar melalui Kurikulum Merdeka. *Jurnal Pendidikan Dasar,* 12(2), 110-125.